



## Sejarah Konflik Muslim Rohingya

**Wasalmi Wasalmi**

Dosen Tetap pada STAI YPIQ Baubau

Korespondensi penulis : [amanahsalmi@gmail.com](mailto:amanahsalmi@gmail.com)

**Abstract.** *The Rohingya are a Muslim population in the Mayu Frontier region, today's Buthidaung and the towns of Maungdaw Arakan (Rakhine), a remote province in the west of the country which includes the entire Naaf River on the border of Bangladesh. Arakan was once an independent kingdom before it was conquered by the Burmese in 1784. This research aims to find out the condition of the Rohingya Muslims, what are the reasons behind the expulsion of the Rohingya Muslims from their own territory and how to solve the problems faced by the Rohingya Muslims.*

**Keywords:** *History, Conflict, Rohingya Muslims*

**Abstrak.** Rohingya adalah warga muslim di wilayah Frontier Mayu, saat ini Buthidaung dan kota-kota Maungdaw Arakan (Rakhine), sebuah provinsi terpencil di bagian barat negara itu dimana termasuk di dalamnya seluruh Naaf Sungai sebagai batas dari Bangladesh. Arakan pernah menjadi kerajaan yang independen sebelum ditaklukkan oleh Burma di 1784. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi umat Islam Rohingya, hal-hal apa saja yang melatarbelakangi muslim Rohingya diusir dari wilayahnya sendiri dan bagaimana solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi muslim Rohingya.

**Kata Kunci:** *Sejarah, Konflik, Muslim Rohingya*

### PENDAHULUAN

Myanmar atau Burma merupakan salah satu negara di Asia Tenggara. Negara ini hingga saat ini masih menebar konflik dalam politik maupun sosial yang ada di dalam negara tersebut. Sehingga Martin Smith, salah seorang jurnalis dan dokumentator sekaligus penulis dalam spesialisasi negeri Myanmar pada tahun 1991, menyebutkan bahwa Negara Myanmar merupakan negara yang menakutkan, hal ini terjadi karena konflik yang berkepanjangan di daerah tersebut. Dia menuliskan, kondisi saat ini di Burma secara kualitatif berbeda dari banyak negara-negara lain di mana sensor yang ketat sedang berlaku. Hukum negara dan Ketertiban Resorasi Masyarakat (SLORC), yang menempel kekuasaan adalah pemerintah yang ilegal. Meskipun pemerintah yang berkelanjutan berupaya untuk memanipulasi pemilu pada bulan Mei 1990, National League for Democracy (NLD) menang telak dari 392 kursi

keluar dari 425 yang tersedia. Pada Sempetember 1991, bagaimana pun, lebih dari 100 NLD anggota parlemen yang baik akan dipenjara, diasingkan atau menghilang.<sup>1</sup>

Ditambah lagi ancaman kekerasan terhadap kebebasan beragama, pada dasarnya telah terjadi jauh sebelum Burma/Myanmar memperoleh kemerdekaannya dari Inggris. Hal itu terlihat dari sejarah awal penderitaan Muslim Rohingya yang bermula ketika orang-orang ultranasionalis Burma menduduki Arakan pada tahun 1784, dimana pada saat itu Muslim Rohingya mengalami penindasan dan penghancuran dari pemerintahan Burma.<sup>2</sup>

Beginilah gambaran keadaan pemerintahan Myanmar pada saat itu dimana pemerintahan tidaklah dijalankan dengan jujur dan penuh dengan kepentingan, sehingga Aung San Sun Kyi pemimpin NLD, sebagai pemenang utama pada saat itu tidak bisa menjeblos kursi pemerintahan. Dan banyak lagi kaum dari minoritas lain dari berbagai etnis dan golongan yang terpinggirkan di negara itu. Salah satunya adalah masyarakat Rohingya yang beragama Islam di daerah Arakan.

## PEMBAHASAN

### A. Profil Negara Myanmar

Myanmar adalah sebuah negara yang memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya (Inggris) pada tanggal 4 Januari 1948. Dahulu disebut dengan Burma/ “Burma Bersatu”. Didirikan pada tahun 1948 sebagai sebuah republik Independent dengan Sao Shew Thaik sebagai president pertamanya dan U Nu sebagai Perdana Menteri pertama. Pergantian nama ini dari (Burma-Myanmar) mulai diberlakukan pada 18 Juni tahun 1989, yaitu satu tahun pasca lengsernya jenderal Ne Win dari tampuk kekuasaannya sebagai perdana menteri kedua pengganti U Nu, dan digantikan oleh jenderal Saw Maung yang sama halnya dengan Ne Win berasal dari kalangan militer.

Terdapat dua tujuan utama pergantian nama negara ini, pertama: sebagai penekanan bahwa negara telah terbebas dari penjajahan Inggris, kedua: sebagai upaya menumbuhkan persatuan di kalangan etnis yang tersebar di negeri itu. Yang terakhir ini sebagaimana diungkapkan oleh Menlu U Ohn Gway, bahwa kata “Burma” itu sesungguhnya merupakan salah satu nama suku bangsa kami, sedangkan “Myanmar” dalam bahasa kami berarti seluruh

---

<sup>1</sup>Nasruddin, Islam di Myanmar, Dalam *Jurnal al-Hikmah*, vol. XIX No. 2, 2017, h. 61.

<sup>2</sup>Nurmala Sari, Skripsi Muslim Rohingya dan HAM Pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008 Analisis Pelanggaran Hak Beragama, h. 2.

negara kita.<sup>3</sup> Ditambahkan oleh Nasruddin dalam jurnalnya, bahwa tujuan dari bergantinya nama adalah agar etnis non-Burma juga merasa bagian dari negara ini.<sup>4</sup> Selain nama negara dan ibukota, pemerintah militer Myanmar juga menggantikan bendera dan lagu kebangsaannya pada tanggal 21 Oktober 2010.<sup>5</sup>

Berlokasi paling ujung Barat di wilayah Asia Tenggara, dan merupakan negara terluas kedua di Asia Tenggara yang terbentang hampir 1500 mil dari utara hingga selatan. Myanmar lebih besar dari Vietnam, tapi lebih kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan kepulauan Indonesia. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan lima negara tetangga, yakni dengan Cina di sebelah utara; Laos di sebelah timur; Thailand di sebelah tenggara; Bangladesh di sebelah barat; India di sebelah barat laut; sebelah selatan berhadapan dengan laut Andaman; dan sebelah barat dayanya menghadap ke teluk Bengal, menjadikan Myanmar sebagai salah satu negara geografis yang amat strategis bagi lalu lintas internasional. Area geografis yang menentukan bagi Myanmar ini dapat dilacak dari *Perjanjian Panglong*.

Memiliki luas wilayah 678.500 km persegi, dengan area perairan yang hanya 3,06% (wilayah pesisir selatan yang berhadapan dengan lautan Andaman dan dan Barat Daya teluk Bengal). Jumlah penduduknya pada tahun 2005/2006 diperkirakan mencapai 55,396 juta jiwa, yang mana 27,540 atau 49,71% adalah laki-laki, dan 27,856 adalah wanita, populasi ini terdiri dari kelompok etnis yang berbeda-beda, baik dalam bahasa, agama, ataupun mobilitas sosialnya. 2/3 terdiri dari etnis Burma, dan 1/3 sisanya dari etnis minoritas.

Terdapat sekitar 135 kelompok etnis yang tersebar di Myanmar, dengan lebih dari 100 bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Sulitnya memperoleh daftar etnis yang tersebar, ditunjang gambaran yang diberikan pemerintah yang menolak etnis minoritas tertentu, mengakibatkan hanya beberapa etnis saja yang terlacak. Populasi hampir 50 juta. Mayoritas adalah etnik Bamas, yang seperti Shan, Kachin, Chin, Mon, Rokhine, Muslim Burma, Muslim India, Muslim Cina, dan lainnya merupakan kelompok minoritas di Burma.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Nurmala Sari, Skripsi Muslim Rohingya dan HAM Pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008 Analisis Pelanggaran Hak Beragama, h. 15.

<sup>4</sup>Nasruddin, Islam di Myanmar, Dalam *Jurnal al-Hikmah*, Vol. XIX No. 2, 2017, h. 61.

<sup>5</sup>Nasruddin, Islam di Myanmar, Dalam *Jurnal al-Hikmah*, Vol. XIX No. 2, 2017, h. 62.

<sup>6</sup>The Roots, "Fruits and Dreams of All The Muslims in Myanmar" artikel ini diakses pada 15 Maret 2008 dari <http://www.rohingya.jp/pdf/muslims.pdf>, h. 1-2.

Agama buda ditetapkan sebagai agama resmi negara. Ibukota negara terletak di Rangoon yang pada tanggal 7 November 2005 dipindahkan ke Pyinmana. Mata uang yang digunakan kyat. Dan bahasa resmi Myanmar adalah bahasa Myanmar.<sup>7</sup>

Sistem pemerintahan Myanmar adalah Republik Presidensial. Di Republik Presidensial Myanmar ini kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang Presiden yang dibantu oleh dua orang wakil presiden. Namun, pada April 2016 Presiden membentuk jabatan baru yaitu Kanselir Negara (state counsellor) yang setara dengan jabatan Perdana Menteri. Saat ini, Kanselir Negara dijabat oleh Aung San Suu Kyi.

Di bidang perekonomian, Myanmar adalah negara berkembang yang mendapatkan pendapatan domestic bruto sebesar US\$307,3 miliar dengan pendapatan perkapitanya sebesar US\$6000,- (2016). Tulang punggung perekonomian Myanmar adalah sektor pertanian seperti beras, kacang, tebu, produk per kayu dan produk-produk perikanan. Selain pertanian, industry lain yang penting bagi perekonomian Myanmar adalah garment, semen, bahan konstruksi, farmasi, pupuk, serta sector pertambangan seperti tembaga, besi, timah, minyak bumi, gas alam dan batu-batu mulia (permata dan giok).<sup>8</sup>

Politik luar negeri, Myanmar bergabung dengan ASEAN pada 23 Juli 1997. Myanmar juga merupakan anggota PBB dan lembaga-lembaga di bawah PBB, anggota Asian Development Bank (ADB). Orang-orang Rohingya memang berbeda dengan orang Myanmar. Sejak Myanmar masih berupa kerajaan, ketegangan memang sudah terasakan. Di kemudian hari, perbedaan fisik, bahasa, budaya lalu agama dijadikan dasar untuk mengecap Rohingya yang sudah ratusan tahun berada di Arakan itu sebagai pendatang ilegal.

Menurut Human Right Watch, antara 2012 hingga 2014, 300 ribu orang Rohingya terusir. Menurut pemerintah Myanmar, pengusiran orang-orang Rohingya yang terjadi pada 2012 itu karena adanya pembunuhan, perkosaan, perampokan terhadap seorang perempuan Budha pada 2 Mei 2012 di Yanbye. Setelah kejadian itu, menurut pemerintah sepuluh orang muslim Rohingya di sebuah bus di Taungup dibunuh pada 3 Juni 2012. Alasannya adalah balas dendam. Pemerintah Myanmar bukannya memberi pengamanan bagi mereka yang terancam, aparat keamanan Myanmar menurut Human Right Watch justru ikut serta menyerang orang-orang Rohingya. Keterlibatan Biksi Ashin Wirathu dari kelompok Budha Arakan yang memiliki lascar bernama gerakan 969, berperan aktif menebar terror dan

---

<sup>7</sup>Nasruddin, Islam di Myanmar, Dalam *Jurnal al-Hikmah*, Vol. XIX No. 2, 2017, h. 62.

<sup>8</sup>Nasruddin, Islam di Myanmar, Dalam *Jurnal al-Hikmah*, Vol. XIX No. 2, 2017, h. 62.

kebencian. Mereka mulai menebarkan kebencian terutama setelah Taliban menghancurkan Patung Budha di Bamiyan (Afghanistan) 2001.<sup>9</sup>

Menurut Siegfried O. Wolf, seperti diliris dw.com (31/8/2015), pemerintah Myanmar adalah biang kerok atas derita orang-orang Rohingya di Myanmar. Orang-orang Rohingya itu dianggap sebagai saingan tambahan oleh pihak penguasa dalam kehidupan sosial politik di sana. Orang-orang Rohingya dianggap bukan pendukung pemerintah yang berkuasa. Pemerintah juga mendukung fundamentalis Budha untuk menjaga kepentingannya atas kekayaan yang ditinggali orang-orang Rohingya itu.

Junta militer Myanmar dianggap secara sengaja memelihara kebencian massa terhadap Rohingya untuk mengalihkan sorotan publik kepada mereka. Kehidupan sosial politik yang tertutup, pengelolaan pemerintahan yang otoriter, sampai pelanggaran HAM memang membuat junta militer Myanmar dikecam. Junta secara sengaja mengobarkan kebencian kepada Rohingya untuk menciptakan musuh bersama. Menciptakan sosok musuh bersama adalah siasat untuk membangun persatuan dan kesatuan. Diharapkan, jika kebencian terhadap Rohingya bisa digerakkan dengan massif, maka rakyat Myanmar tidak akan peduli terlalu peduli pada desakan demokratisasi yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itulah, dikampanyekan bahaya Rohingya di kawasan-kawasan tertentu. Rohingya dikesankan sebagai calon penguasa baru yang menguasai sumber-sumber ekonomi, sehingga penduduk asli Myanmar akan banyak kehilangan sumber-sumber penghidupan.<sup>10</sup>

Dalam bidang agama, pemerintah Myanmar secara umum mencanangkan kebijakan untuk memberi kebebasan kepada penduduknya dalam menjalankan agama mereka masing-masing. Hal ini sebagaimana tercantum dalam undang-undang Myanmar pasal 12 dan 147 yang menyebutkan bahwa pemerintah menjamin kesetaraan dalam hukum tanpa melihat ras, agama, status maupun jenis kelamin. Walaupun dalam prakteknya, tetap ketat mengontrol dan menguasai kehidupan beragama.<sup>11</sup>

Selama kekuasaan berada di tangan militer, pemerintah dalam ofensifnya menghancurkan tempat-tempat ibadah non Budha. Mesjid dan Gereja diganti dengan Pagoda, menjadi sasaran utama pemerintah karena Kristen dan Islam merupakan minoritas terbesar yang tersebar di Myanmar. Namun diskriminasi paling parah terhadap muslim Rohingya yang berada di Rakinhe.

---

<sup>9</sup>Nasruddin, Islam di Myanmar, Dalam *Jurnal al-Hikmah*, Vol. XIX No. 2, 2017, h. 63.

<sup>10</sup>Nasruddin, Islam di Myanmar, Dalam *Jurnal al-Hikmah*, Vol. XIX No. 2, 2017, h. 63.

<sup>11</sup>Nurmala Sari, Skripsi Muslim Rohingya dan HAM Pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008 Analisis Pelanggaran Hak Beragama, h. 24.

Pemerintah memperkenalkan dan kemudian menetapkan wilayah terlarang bagi muslim Myanmar khususnya pada tahun 1991. Pada saat ini, al-Qur'an dan desa kaum muslim yang terletak di wilayah yang menjadi titik kediaman umat Islam seperti Yagoon, Swebo, Mandalai dan Rakhine dirusak dan atau dibakar oleh tentara, tanah mereka dirampas dan diperuntukan bagi pemukiman baru Budha.<sup>12</sup>

## **B. Rohingya dan Sejarah Masuknya Islam di Myanmar**

Islam masuk ke Myanmar sekitar 1055. Pedagang-pedagang Arab memperkenalkan Islam kepada mereka saat mendarat di delta Sungai Ayeyarwady, Semenanjung Tanintharyi, dan daerah Arakan yang terletak di sisi Barat Myanmar. Gunung Arakan memisahkan wilayah daerah Arakan dengan daerah-daerah lain Myanmar yang mayoritas menganut Budha. Selain etnis Arakan, etnis Shan juga dikenal sebagai penganut Islam. Kedatangan umat Islam ini dicatat oleh orang-orang Eropa, Cina dan Persia. Populasi umat Islam yang ada di Myanmar saat ini terdiri dari orang Arab, Persia, Turki, Moor, Pakistan dan Melayu. Selain itu, beberapa warga Myanmar juga menganut agama Islam seperti dari etnis Rakin dan Shan.<sup>13</sup>

Orang-orang Islam yang merupakan penduduk asli Myanmar disebut Pathi, sedangkan orang-orang Islam yang berasal dari Cina disebut Panthay. Dari sana Islam menyebar ke berbagai daerah, seperti Pegu, Tenasserim dan Pathein. Dulunya, menurut catatan Apiko Joko Mulyono di act.id (07/06/2016), raja Arakan punya sejarah tak akur dengan raja Myanmar pada 1406. Kebetulan raja Myanmar dan pengikutnya adalah Budha. Kuatnya raja Myanmar membuat raja Arakan Naramakhbala tersingkir dari wilayahnya dan mengungsi ke Bengali. Penguasa Bengal, Sultan Nasiruddin dimintai bantuan oleh Naramakhbala. Naramakhbala lalu mengucapkan syahadat dan berganti nama menjadi Sulaeman Shah. Atas bantuan penguasa Bengali Sultan Nasiruddin, Naramakhbala akhirnya berhasil merebut kembali wilayahnya dari kekuasaan raja Myanmar. Pada 1420, Arakan memproklamkan diri sebagai kerajaan Islam merdeka di bawah Raja Suleman Shah.<sup>14</sup>

Kekuasaan Arakan yang Islam itu bertahan hingga 350 tahun. Pada tahun yang na'as 1784 Arakan kembali dikuasai oleh Raja Myanmar. Pada tahun 1824, Arakan menjadi koloni Inggris juga. Populasi Islam di kawasan perlahan-lahan berkurang.

---

<sup>12</sup>Nurmala Sari, Skripsi Muslim Rohingya dan HAM Pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008 Analisis Pelanggaran Hak Beragama, h. 24.

<sup>13</sup>Nasruddin, Islam di Myanmar, Dalam *jurnal al-Hikmah*, Vol. XIX No. 2, 2017, h. 65.

<sup>14</sup>Nasruddin, Islam di Myanmar, Dalam *jurnal al-Hikmah*, Vol. XIX No. 2, 2017, h. 64.

Orang Rohingya bukan satu-satunya kelompok etnis yang beragama Islam di Myanmar. Selain Rohingya dan etnis Shan. Orang-orang Myanmar sebenarnya banyak yang sudah menjadi muslim. Muslim Myanmar ini disebut Zerbadee, komunitas yang paling lama berdiri dan berakar di wilayah Shwebo. Mereka diduga merupakan para pendakwah Islam paling awal yang beranak pinak dengan etnis-etnis bumiputera di Myanmar.<sup>15</sup>

Ketika Myanmar merdeka dari Inggris pada 4 Januari 1948, enam setelah ayah Aung San Suu Kyi terbunuh oleh kolega militernya sendiri, Arakan pernah dijanjikan sebagai daerah otonomi khusus. Rupanya otonomi itu hanya sebatas janji kosong. Setelah tumbangnya kolonialisme Inggris di Myanmar, orang Islam di Arakan yang menjadi pedagang merasa perekonomian mereka memburuk. Banyak dari mereka yang pergi dari Arakan. Jenderal Ne Win dan miliernya bahkan menganggap mereka sebagai pendatang ilegal.

Menurut Uqbah Iqbal dalam isu pelarian Rohingya (2016), orang-orang Rohingya secara fisik, bahasa dan budaya, lebih mirip orang-orang Bengali dari Asia Selatan. Selain mirip orang-orang Bengali, ada juga orang-orang Arab, Persi dan Psthun yang datang ke Arakan pada zaman kekaisaran Mughal yang Berjaya di sekitar India. Perbedaan fisik itu tentu dikembangkan sebagai bagian kampanye rasisme untuk mengusir mereka dari Myanmar.

Isu rasis itu digoreng lagi dengan peraturan yang tak kalah rasisnya, yakni kewarganegaraan Myanmar 1982, ketika jenderal Ne Win berkuasa, orang-orang Rohingya dianggap bukan warga negara Myanmar melainkan para pendatang. Hingga ada alasan bagi aparat Myanmar untuk tidak melindungi mereka.<sup>16</sup>

Menurut Shofwan al-Banna Choiruzzad dalam ASEAN di persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi dan Integrasi Ekonomi, meski pemerintah Myanmar mengaku bersikap netral, namun aparat negara mereka dan maysarakat di Arakan punya wacana orang-orang Rohingya adalah orang asing yang datang sejak lama untuk menguasai kekayaan orang Myanmar. Dan hal itu sudah berlangsung lama. Menurut Uqbah Iqbal, setidaknya sudah 30 ribu orang Rohingya sudah terbunuh pada 26 Juli 1938. Saat itu Myanmar masih menjadi koloni Inggris di Asia Tenggara. Pada 1942, terjadi pembantaian di Arakan antara orang-orang yang beragama Budha dengan orang-orang Rohingya yang menjadi Milisi dalam unit

---

<sup>15</sup>Nasruddin, Islam di Myanmar, Dalam *jurnal al-Hikmah*, Vol. XIX No. 2, 2017, h. 64-65. Lihat juga Azizah, Pemberontakan Separatis Muslim Rohingya Pasca Kemerdekaan Burma 1948-1988, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Depok 2006, h. 1-2.

<sup>16</sup>Nasruddin, Islam di Myanmar, Dalam *jurnal al-Hikmah*, Vol. XIX No. 2, 2017, h. 65.

militer Inggris yang disebut V Force. Sudah pasti ada korban di kedua belah pihak. Setelah tahun 1942, di tahun 1968 dan 1992, kini mereka terbantai lagi dan terusir, sampai Aung San Suu Kyi pun bungkam.<sup>17</sup>

Sebagian besar muslim di Myanmar bekerja sebagai penjelajah, pelaut, saudagar dan tentara. Beberapa di antaranya juga bekerja sebagai penasihat politik di Kerajaan Burma. Muslim Persia menemukan Myanmar setelah menjelajahi daerah Selatan Cina. Koloni muslim Persia di Myanmar ini tercatat di buku *Chronicles of China* di 860. Populasi Islam di Myanmar sempat meningkat pada masa penjajahan Britania Raya, dikarenakan banyak umat muslim India yang bermigrasi ke Myanmar. Akan tetapi, populasi umat Islam semakin menurun ketika perjanjian India-Myanmar ditandatangani pada tahun 1941.<sup>18</sup>

### C. Etnis Rohingya

Orang-orang Rohingya adalah muslim di wilayah Frontier Mayu, saat ini Buthidaung dan kota-kota Maungdaw Arakan (Rakhine), sebuah provinsi terpencil di bagian barat negara itu dimana termasuk di dalamnya seluruh Naaf Sungai sebagai batas dari Bangladesh. Arakan pernah menjadi kerajaan yang independen sebelum ditaklukkan oleh Burma di 1784. Sejarawan Rohingya telah menulis banyak risalah dimana mereka mengklaim untuk diri mereka sendiri status asli yang dapat dilacak dalam negara Arakan selama lebih dari seribu tahun.

Untuk melacak nama Rohingya, kita cukup melihat pada awal tahun 1950 bahwa beberapa Bengali intelektual Muslim dari bagian barat laut Arakan mulai menggunakan “Rohingya” untuk menyebut diri mereka. Mereka memang langsung keturunan imigran dari Chittagong Distrik di Timor Bengal (sekarang Bangladesh) yang telah bermigrasi ke Arakan setelah provinsi ini diserahkan ke British India berdasarkan ketentuan Perjanjian Yandabo, suatu peristiwa yang menyimpulkan perang Anglo-Burma Pertama (1824-1826).

Kaum Muslim di Arakan dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu Bengali Chittagong di Mayu Frontier, keturunan dari Komunitas Muslim di Arakan periode Mrauk-U (1430-1784), saat ini tinggal Mrauk-U dan Kyauktaw Kotapraja, keturunan tentara bayaran Muslim di Pulau Ramree, oleh masyarakat Arakan diketahui sebagai Kaman, dan Muslim

<sup>17</sup>Nasruddin, Islam di Myanmar, Dalam *jurnal al-Hikmah*, Vol. XIX No. 2, 2017, h. 65-66.

<sup>18</sup>The Roots, “Fruits and Dreams of All The Muslims in Myanmar” artikel ini diakses pada 15 Maret 2008 dari <http://www.rohingya.jp/pdf/muslims.pdf>, h. 1-2.



dari daerah Myedu Tengah Burma, ditinggalkan oleh penyerbu Buma di Kabupaten Sandoway setelah penaklukan Arakan 1784.<sup>19</sup>

Komunitas Rohingya, yang bermukim di negeri bagian Arakan atau Rakhine. Rohingya adalah suku dari orang Islam dengan budaya mereka yang kelas terlihat di daerah Arakan. Hal itu karena mereka menurunkan agama mereka pada seluruh keturunan mereka dari bangsa Arab, Moor, Pathan, Moghul, Asia Tengah, Bengal dan beberapa bangsa Indo-Mongol. Percampuran dari suku, membuat penampakan fisik unik mereka seperti tulang pipi yang tidak begitu keras, mata mereka yang tidak begitu sipit seperti orang Rakhine Magh dan orang Burma. Hidung mereka tidak begitu pesek, dan lebih tinggi dari orang Rakhine Magh tetapi kulit mereka lebih gelap, beberapa dari mereka kulitnya kemerahan tetapi tidak terlalu kekuningan.<sup>20</sup>

#### **D. Pertikaian antara Muslim Rohingya dan Budha Arakan**

Dalam periode kemerdekaan di Burma 1920-an sampai 1930-an kaum Muslim dari Frontier Mayu lebih bersangkutan dengan kemajuan Liga Muslim di India, meskipun beberapa tokoh Muslim Burma seperti MA Rasyid dan U Razak memainkan peran penting dalam kepemimpinan gerakan nasionalis Burma. Pada tahun 1931, Komisi Simon ditunjuk oleh Parlemen Inggris untuk menanyakan pendapat Burma untuk reformasi konstitusional dan pada masalah apakah Burma harus dipisahkan dari kekaisaran India. Juru bicara dari Liga Muslim untuk bagian yang adil dari keparlemenan, sepeluh persen perwakilan dari semua badan publik, dan khususnya di Arakan, perlakuan yang sama bagi umat Islam dalam bidang pertanian dan perdagangan.

Ketika tahun 1942, dimana pada saat itu tentara Inggris ditarik ke India dan pada saat itu kaum Budha yang dendam terhadap kaum Muslim karena mendapatkan hak khusus dari tentara Inggris, mereka menyerang Arakan sehingga umat Muslim di sana mengungsi dari Arakan ke India dan Bangladesh, dan pada saat ini populasi Islam di Burma menurun.

Selama masa perang dunia II tahun 1948, terjadi pertumpahan darah antara Etnik Budhist dan Etnik Muslim, hal ini meruncing hampir selama satu abad, hal ini terjadi karena System Zamindary yang mana dibawa oleh pemerintahan Inggris dalam pengaturan para

---

<sup>19</sup>Aye Chan, Kanda Uiversity of International Studies, The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar), SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479-8484, <https://www.soas.ac.uk/sbbr/editions/file64388.pdf> (6 Januari 2016), h. 397.

<sup>20</sup>The Roots, "Fruits and Dreams of All The Muslims in Myanmar" artikel ini diakses pada 15 Maret 2008 dari <http://www.rohingya.jp/pdf/muslims.pdf>, h. 1-2.

pemilik tanah, sehingga para petani tidak lagi memiliki pekerjaan. Hingga saat ini, kekerasan di Myanmar terus meruncing, sehingga umat Muslim di Arakan terus berusaha menghadapi kebebasan mereka melawan Gerakan Militer Junta Budha yang terus mendesak umat Muslim sehingga umat Muslim khususnya di Arakan dari segi populasi, pendidikan, kebudayaan dan ekonomi. Kita bisa melihat perbandingan populasi Muslim di Arakan pada tahun 1983 sebanyak 24,3% dan populasi Budha sebanyak 67,8% dan hingga tahun ini terus menurun.<sup>21</sup>

### **E. Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Muslim**

Dalam sejarah Myanmar telah tercatat, bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan etnis minoritas khususnya Muslim adalah hubungan antara penguasa dan pemberontak. Paling tidak, demikianlah posisi yang diambil pemerintah Myanmar terhadap umat Islam khususnya Rohingya. Hingga kebijakan yang dibuat pun terhadap kelompok yang satu ini adalah kebijakan memadamkan pemberontakan yang cenderung merugikan dalam segala bidang.

Terkait kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Islam, penetapan yang dibuat adalah penetapan “anti-Islam” khususnya terhadap muslim Rohingya selaku komunitas Muslim terbesar di Myanmar. Melalui kampanye imigran ilegalnya yang mulai diproklamkan pada tahun 1978, yang bertujuan mengeluarkan orang-orang Islam khususnya Rohingya dari akar budaya bangsa, pemerintah Myanmar (SLORC) dalam ofensifnya antara lain menghancurkan Masjid dan menggantinya dengan pagoda, membakar al-Qur’an dan desa kaum Muslim, tak kurang dari 125.000 orang Islam dipaksa masuk agama Budha oleh pemerintah, dipaksa makan daging babi, memperkosa wanita-wanita Islam, mengusir orang-orang Islam dari tempat tinggal mereka dan melarangnya kembali.<sup>22</sup>

Lebih memprihatinkan lagi, ketika junta militer apa yang disebut Operasi Raja Naga (Nagamin) pada tahun 1978 untuk membatasi ruang gerak suku Rohingya dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya.<sup>23</sup> Di bawah undang-undang Myanmar tentang warganegara, masyarakat Islam umumnya dan Rohingya khususnya diperlakukan sebagai warga kelas dua dan hak kewarganegaraannya dikurangi bahkan dihilangkan. Dengan tidak diperkenankan memiliki kartu identitas (KTP), segala akses yang berhubungan dengan hak-hak

---

<sup>21</sup>Nasruddin, Islam di Myanmar, Dalam *jurnal al-Hikmah*, Vol. XIX No. 2, 2017, h. 68.

<sup>22</sup>Nurmala Sari, Skripsi Muslim Rohingya dan HAM Pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008 Analisis Pelanggaran Hak Beragama, h. 27.

<sup>23</sup>Tajuk Rencana, Mimpi Buruk Gelombang Pengungsi. Kompas 31 Januari 2009.

warganegara, seperti memperoleh pekerjaan, ijin perjalanan, peluang berdagang, memperoleh pendidikan hingga menikah bagi masyarakat Islam di Myanmar dibatasi dan atau dipersulit.<sup>24</sup>

Sejak tahun 1992, masyarakat Rohingya mendapatkan kewajiban pajak baru. Seluruh bentuk usaha dipajaki oleh pemerintah. Setiap keluarga Rohingya di Arakan Utara harus membayar pajak cabe di pasar dengan harga 500 kyat dan menjualnya ke pemerintah dengan harga yang telah ditentukan pemerintah yaitu 100 kyat. Mereka juga harus membayar fee bila ingin mencari ikan di sungai atau memotong bamboo di hutan. Pajak juga diterapkan kepada petani ternak. Pemilik sapi harus membayar 80 kyat pertahun sedangkan kambing 30 kyat pertahun. Masyarakat Rohingya juga harus membayar ijin jika bepergian dari kampungnya ke kampong berikutnya atau ke pasar untuk menjual hasil produksi mereka, dan jarang ketika sampai di pasar, militer seringkali datang dan mengambil apa yang mereka inginkan tanpa mau membayar. Semua itu mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan yang tergolong parah diderita kelompok Muslim di Myanmar.<sup>25</sup> Dan masih banyak lagi tekanan-tekanan yang dirasakan Muslim Myanmar.

Dari berbagai macam deskriminasi yang dirasakan Muslim di Myanmar, lebih dari 250.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh selama dekade 1990 dengan alasan menghindari penganiayaan oleh militer. Laporan Human Rights Watch Asia yang berjudul “Akhir Sebuah Eksodus Muslim Rohingya” menyebutkan, bahwa selama periode 34 tahun kekuasaan junta Militer Myanmar (1962-1996) terjadi dua kali eksodus pengungsi besar-besaran Rohingya ke Bangladesh, dengan tuduhan murni pelanggaran HAM di semua sendi kehidupan. Lebih lanjut disebutkan bahwa jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya jika pemerintah Myanmar tidak segera mengubah sikap dan perlakuan mereka terhadap minoritas ini.<sup>26</sup>

UNHCR selaku lembaga yang menangani masalah pengungsi di dunia, pada tahun 2003 mencatat, terdapat 235.000 Muslim asal Arakan Utara bagian Selatan Myanmar terdapat di dua camp pengungsian di Cox’s Bazar-Bangladesh yaitu Kutupalong dan Nayapara. Lebih lanjut disebutkan komunitas Muslim telah tinggal di tempat tersebut sejak

---

<sup>24</sup>Nurmala Sari, Skripsi Muslim Rohingya dan HAM Pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008 Analisis Pelanggaran Hak Beragama, h. 28.

<sup>25</sup>Nurmala Sari, Skripsi Muslim Rohingya dan HAM Pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008 Analisis Pelanggaran Hak Beragama, h. 29.

<sup>26</sup>Nurmala Sari, Skripsi Muslim Rohingya dan HAM Pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008 Analisis Pelanggaran Hak Beragama, h. 62.

tahun 2000. Akhir tahun 2005 UNHCR di Malaysia mencatat terdapat 11.277 pengungsi Rohingya asal Arakan Utara bagian Selatan Myanmar.<sup>27</sup>

Sekitar 1000 pengungsi Rohingya yang dalam perkembangannya disebut manusia perahu terdampar di pantai Thailand pada Desember 2008, dan sebanyak 391 pengungsi Rohingya diselamatkan pihak Indonesia ketika terdampar di perairan Subang Aceh pada awal bulan Januari 2009.

Dalam kerangka sosiologis, resistensi (pertentangan) dengan cara melarikan diri atau mengungsi ke berbagai negeri sebagaimana yang dilakukan Muslim Rohingya ini, dapat dimengerti sebagai usaha pelarian kelompok minoritas tertindas yang bertujuan tidak hanya melepaskan diri dari keras dan kasarnya sikap penguasa terhadap mereka, namun dapat dipahami sebagai usaha pemberitahuan kepada dunia luar atau masyarakat internasional bahwa di negara tempat mereka tinggal sedang terjadi kejahatan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Letaknya yang amat strategis bagi jalur perdagangan internasional, yang mengakibatkan Arakan menjadi jembatan penghubung antara Asia Selatan dan Asia Tenggara, disertai kandungan hidrokarbon yang bagus di wilayah ini pun karena berdekatan dengan blok eksplorasi air dangkal (*shallow water*), tak dapat dipungkiri menjadi benang merah yang memicu tragedi pelanggaran HAM berat terhadap Muslim Rohingya sebagai komunitas yang mendominasi wilayah tersebut.<sup>28</sup>

Ambisi pemerintah Myanmar yang ingin memasukan wilayah ini ke dalam teritorial mereka secara keseluruhan, berbanding terbalik dengan keengganan Arakan masuk dalam teritorial negara itu. Beberapa sumber mengindikasikan keinginan Arakan memisahkan diri dari kekuasaan Myanmar dan membentuk kerajaan Islam di Arakan sebelum Myanmar menginvasi Arakan tahun 1784, disertai trauma sejarah Rohingya akan perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap kelompok mereka menjadi sebab utama keengganan ini. Alhasil perebutan wilayah antara pemerintah dengan Muslim Rohingya pun kerap terjadi, dan akhirnya menimbulkan jurang perbedaan di antara keduanya kian tajam.

Selain itu, kekhawatiran pemerintah akan populasi Rohingya yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya, menjadi secama bara yang turut menyulut kebencian pemerintah kepada Rohingya semakin menguat. Pamphlet propaganda anti Islam pun disebarluaskan pemerintah Myanmar dengan mengatasnamakan Front Pelajar Demokratik Seluruh Burma

---

<sup>27</sup>Burma Issues & Concerns: The Security Dimentions (ALTSEAN BURMA, Vol. 4), h. 35.

<sup>28</sup>Nurmala Sari, Skripsi Muslim Rohingya dan HAM Pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008 Analisis Pelanggaran Hak Beragama, h. 63.

(ABSDF) mengajak kepada seluruh umat Budha untuk melawan seluruh ekspansi Muslim Rohingya. Tergambar dari isi pamphlet tersebut, orang-orang Islam melalui beragam aktivitas dakwahnya termasuk melalui taktik berdarah (martir-syuhadah), berupaya menguasai seluruh daerah di Myanmar seraya menghancurkan komunitas Budha secara umum seperti yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Karenanya, sebuah kewajiban bagi segenap Budha di Myanmar untuk mempertahankan agama, budaya, sejarah dan cirri-ciri nasionalnya, menguatkan solidaritas, memboikot seluruh tokoh Muslim, serta tidak berhubungan sosial dengan Muslim.<sup>29</sup>

Alhasil seruan dalam pamphlet tersebut akhirnya mengakibatkan sentiment anti-Islam di kalangan pemerintah dan masyarakat sipil Budha kian marak tidak hanya di Arakan tetapi di seluruh Myanmar.

Dalam konteks ini, ASEAN selaku lembaga regional yang masih kukuh menerapkan prinsip non-interference dan tetap teguh menggandeng Myanmar dalam lingkup regional meskipun berbagai kritikan kerap dialamatkan kepada lembaga ini pada negara Myanmar. Sumber daya alam yang terkandung di bumi Myanmar seperti kandungan minyak di sekitar laut Andaman, gas, opium, dan berbagai jenis bebatuan berharga seperti giok, rubi, safir, mutiara dan batu merah yang terdapat di area sekitar 125 mil persegi pegunungan yang sangat menguntungkan perekonomian Myanmar, karena di samping menambah pasongan devisa negara, perdagangan internasional ini terbukti mampu menopang roda ekonomi dalam negeri, meskipun negara dalam keadaan gencarnya embargo pihak asing, diindikasikan sebagai sebab ekstern yang teramat kuat bagi Myanmar melanggengkan dan secara tidak langsung melegalkan pelanggaran HAM di negaranya.<sup>30</sup>

## **F. Upaya Dunia dan Peran ASEAN dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Beragama Muslim Rohingya**

Sebelum peristiwa penindasan dan pembantaian gerakan pro demokrasi oleh Junta Militer yang berlangsung 1988-1991, respon yang diberikan dunia internasional terhadap persoalan yang terjadi di Myanmar, khususnya kondisi umat Islam yang telah nyata mengalami berbagai penindasan dan usaha penghancuran Junta Militer dapat dikatakan tidak berarti. Masyarakat internasional masih berdiam diri dan memandang bahwa persoalan

---

<sup>29</sup>Nurmala Sari, Skripsi Muslim Rohingya dan HAM Pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008 Analisis Pelanggaran Hak Beragama, h. 64.

<sup>30</sup>Nurmala Sari, Skripsi Muslim Rohingya dan HAM Pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008 Analisis Pelanggaran Hak Beragama, h. 65.

tersebut semata-mata adalah urusan dalam negeri Myanmar. Sebelum 1998, Amerika Serikat praktis hanya memandang berbagai penindasan yang dilakukan pemerintah Myanmar khususnya terhadap Muslim Rohingya secara sebelah mata.

Perlakuan buruk Junta Militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya yang berakhir pada pengusiran mereka, sempat menjadi sorotan masyarakat internasional pada tahun 1992 dan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Puluhan ribu Muslim Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh. Badan-badan internasional melaporkan berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan pihak penguasa, mulai dari kerja paksa, membangun jalan, jembatan dan perkampungan militer, perampokan harta benda rakyat, sampai perkosaan terhadap wanita Rohingya di bawah ancaman senjata telah menjadi pemandangan umum di Arakan, khususnya Arakan Utara yang didominasi Muslim Rohingya.<sup>31</sup>

Dukungan terhadap Muslim Rohingya datang dari berbagai pihak, tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu tempat terdamparnya Muslim Rohingya. Ormas Islam Indonesia yaitu Hizbullah mendatangi kedutaan besar Myanmar di jalan Agus Salim untuk memprotes perlakuan negara tersebut terhadap etnis Rohingya. Selanjutnya Gerakan Pemuda Muslim Malaysia (ABIM), secara berkala memohon kepada PBB dan organisasi konferensi Islam untuk menekan Myanmar dan meminta kepada Junta Militer Myanmar untuk membangun kembali masjid yang telah mereka hancurkan. Menjatuhkan larangan visa berkunjung ke Amerika Serikat, untuk lebih dari 30 anggota Junta Militer Myanmar beserta keluarganya dan orang-orang yang bertanggung jawab atas berlanjutnya serangan-serangan terhadap warga sipil yang tidak berdosa. AS pun melalui Deplunya memperpanjang larangan impor ke Myanmar.

Menurut Heru Susetyo yang merupakan Dosen Hukum HAM Universitas Indonesia, bahwa kasus Muslim Rohingya bukanlah kekerasan spontan saja, melainkan structural, massif, dan sudah berlangsung lama bahkan sejak sebelum negara itu lepas dari pendudukan Inggris. Karenanya, perlu pendekatan komprehensif yang memenuhi pula rasa keadilan dan memperhatikan masalah kesejahteraan dan keadilan sosial selain soal keamanan.<sup>32</sup>

Selanjutnya Indonesia dalam hal ini atas perintah Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk turun langsung melobi Myanmar dan pengarahan

---

<sup>31</sup>Nurmala Sari, Skripsi Muslim Rohingya dan HAM Pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008 Analisis Pelanggaran Hak Beragama, h. 66.

<sup>32</sup>Palupi Annisa Auliani, Mencari Solusi Rohingya. Kompas 4 September 2017.

bantuan kemanusiaan. Sekalipun, menurut Hikmahanto bantuan kemanusiaan pun belum bisa sepenuhnya disebut sebagai langkah konkret untuk solusi permasalahan di Rakhine.<sup>33</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal beberapa hal mengenai makalah ini, di antaranya:

1. Orang-orang Rohingya adalah muslim di wilayah Frontier Mayu, saat ini Buthidaung dan kota-kota Maungdaw Arakan (Rakhine), sebuah provinsi terpencil di bagian barat negara itu dimana termasuk di dalamnya seluruh Naaf Sungai sebagai batas dari Bangladesh. Arakan pernah menjadi kerajaan yang independen sebelum ditaklukkan oleh Burma di 1784.
2. Dukungan terhadap Muslim Rohingya datang dari berbagai pihak, tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu tempat terdamparnya Muslim Rohingya. Ormas Islam Indonesia yaitu Hizbullah mendatangi kedutaan besar Myanmar di jalan Agus Salim untuk memprotes perlakuan negara tersebut terhadap etnis Rohingya. Selanjutnya Gerakan Pemuda Muslim Malaysia (ABIM), secara berkala memohon kepada PBB dan organisasi konferensi Islam untuk menekan Myanmar dan meminta kepada Junta Militer Myanmar untuk membangun kembali masjid yang telah mereka hancurkan. Menjatuhkan larangan visa berkunjung ke Amerika Serikat, untuk lebih dari 30 anggota Junta Militer Myanmar berserta keluarganya dan orang-orang yang bertanggung jawab atas berlanjutnya serangan-serangan terhadap warga sipil yang tidak berdosa. AS pun melalui Deplunya memperpanjang larangan impor ke Myanmar.

---

<sup>33</sup>Palupi Annisa Auliani, Mencari Solusi Rohingya. Kompas 4 September 2017.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nasruddin, Islam di Myanmar, Dalam *Jurnal al-Hikmah*, Vol. XIX No. 2, 2017.
- Nurmala Sari, Skripsi Muslim Rohingya dan HAM Pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008 Analisis Pelanggaran Hak Beragama.
- The Roots, “Fruits and Dreams of All The Muslims in Myanmar” artikel ini diakses pada 15 Maret 2008 dari <http://www.rohingya.jp/pdf/muslims.pdf>.
- Azizah, Pemberontakan Separatis Muslim Rohingya Pasca Kemerdekaan Burma 1948-1988, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Depok 2006.
- Aye Chan, Kanda University of International Studies, The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar), *SOAS Bulletin of Burma Research*, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479-8484, <https://www.soas.ac.uk/sbbr/editions/file64388.pdf> (6 Januari 2016).
- Tajuk Rencana, Mimpi Buruk Gelombang Pengungsi. Kompas 31 Januari 2009.
- Burma Issues & Concerns: The Security Dimensions (ALTSEAN BURMA, Vol. 4).
- Palupi Annisa Auliani, Mencari Solusi Rohingya. Kompas 4 September 2017.